



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

X

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 699.885.087.463,- berkurang sejumlah Rp.49.741.066.860,03 sehingga menjadi Rp. 650.144.020.602,97 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp 679.885.087.463,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (64.371.806.365,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp 615.513.281.098,00 |

2. Belanja

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp 699.885.087.463,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (49.741.066.759,03)</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp 650.144.020.703,97 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp (34.630.739.605,97) |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp |
| 20.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 14.630.739.605,97</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp. 34.630.739.605,97 |

b. Pengeluaran

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp |
| 0,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 34.630.739.605,97

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 82.300.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(15.592.950.130,00)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 66.707.049.870,00 |

b. Dana Perimbangan

| | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 514.392.820.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(39.333.240.812,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 475.059.579.188,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 83.192.267.463,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(9.445.615.423,00)</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah | | |
| yang sah setelah Perubahan | Rp. | 73.746.652.040,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 20.801.854.664,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(2.344.500.000,00)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 18.457.354.664,00 |

b. Retribusi Daerah

| | | |
|--------------------------|----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 51.927.300.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(14.197.090.371,00)</u> |

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 37.730.209.629,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 1.540.297.336,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (624.719.893,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 915.577.443,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 8.030.548.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.573.360.134,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 9.603.908.134,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 12.024.821.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.063.510.188,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 19.088.331.188,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 398.564.954.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (37.455.417.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 361.109.537.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 103.803.045.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (8.941.334.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 94.861.711.000,00

✓

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

| | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 13.270.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>-,00</u> |

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 13.270.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

| | | |
|--------------------------|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 22.747.576.463,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(6.166.129.423,00)</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya setelah Perubahan Rp. 16.581.447.040,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

| | | |
|--------------------------|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 47.174.691.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(3.279.486.000,00)</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 43.895.205.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|--------------------------|----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 328.842.221.218,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(18.899.470.163,33)</u> |

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 309.942.751.054,67

b. Belanja Langsung

| | | |
|--------------------------|----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 371.042.866.245,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(30.841.596.595,70)</u> |

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 340.201.269.649,30

K

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 253.350.028.118,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (19.046.077.784,33)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 234.303.950.333,67

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 3.359.001.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (238.678.700,00)

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 3.120.322.900,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 5.464.450.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 581.500.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 6.045.950.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp 2.085.550.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (1.564.162.500,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 521.387.500,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 63.583.191.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (16.530.889.900,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 47.052.301.600,00

f. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>17.898.838.721,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 18.898.838.721,00 |

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

| | | |
|--------------------------|-----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 518.116.850,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(16.622.250,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 501.494.600,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 241.585.559.115,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>16.549.772.516,10</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 258.135.331.631,10 |

c. Belanja Modal

| | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 128.939.190.280,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(47.374.746.861,80)</u> |
| Jumlah Belanja Modal | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 81.564.443.418,20 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 20.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>14.630.739.605,97</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah | | |
| setelah Perubahan | Rp. | 34.630.739.605,97 |

✓

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

| | | |
|-------------------|-----|------|
| setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|-------------------|-----|------|

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 20.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>14.630.739.605,97</u> |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

| | | |
|-------------------|-----|-------------------|
| setelah Perubahan | Rp. | 34.630.739.605,97 |
|-------------------|-----|-------------------|

b. Pencairan Dana Cadangan

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

| | | |
|-------------------|-----|------|
| setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|-------------------|-----|------|

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah

| | | |
|-----------------------------------|----|------|
| yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
|-----------------------------------|----|------|

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

| | | |
|-------------------|----|------|
| setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
|-------------------|----|------|

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |



Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

| | | |
|-------------------|----|------|
| setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
|-------------------|----|------|

f. Penerimaan piutang daerah

| | | |
|-----------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
|-----------|----|------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
|--------------------------|-----------|-------------|

Jumlah Penerimaan piutang daerah

| | | |
|-------------------|-----|------|
| setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|-------------------|-----|------|

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

| | | |
|-----------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
|-----------|----|------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
|--------------------------|-----------|-------------|

Pembentukan dana cadangan

| | | |
|-------------------|-----|------|
| setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|-------------------|-----|------|

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

| | | |
|-----------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
|-----------|----|------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
|--------------------------|-----------|-------------|

Jumlah Penyertaan modal (investasi)

| | | |
|-------------------------------------|-----|------|
| Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
|-------------------------------------|-----|------|

c. Pembayaran pokok utang

| | | |
|-----------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
|-----------|----|------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
|--------------------------|-----------|-------------|

Jumlah Pembayaran pokok utang

| | | |
|-------------------|----|------|
| setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
|-------------------|----|------|

d. Pemberian pinjaman daerah

| | | |
|-----------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
|-----------|----|------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
|--------------------------|-----------|-------------|

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

| | | |
|-------------------|----|------|
| setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
|-------------------|----|------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

- (1) Dalam rangka mengantisipasi belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana alam, bencana social, penanggulangan penularan penyakit, kerusakan masal dan kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- (2) Pengeluaran belanja mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga mencakup Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.






Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

| No | Pengelola | Paraf |
|----|--|---|
| 1. | WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU |  |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU |  |
| 3. | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KOTA KOTAMOBAGU |  |
| 4. | Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| 5. | KEPALA BPKD KOTA KOTAMOBAGU |  |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 Oktober 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


SANDE DODO